



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SULAIMAN BAKRI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **857216**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.437.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 524 m2/384 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 362 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 271.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/560 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp. 2.908.000.000
4. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 708.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **200.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S TRD A/T (F 800RE-GQG)/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX 2DP RA A/T/SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR P5E02R22M1 M/T/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **809.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.067.783.339

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.514.683.339

III. HUTANG

Rp. 41.292.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.473.391.339

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.